

PENDAHULUAN

Negara Indonesia berupaya melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945, alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan serta keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan menurut aspirasi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam pembangunan pembinaan pemukiman daerah perkotaan, perlu diusahakan perbaikan dan peningkatan pelayanan umum kota, seperti fasilitas kesehatan, penyediaan sarana komunikasi, air bersih, penanganan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan kebersihan. Melalui usaha-usaha tersebut, daerah dan masyarakatnya akan menjadi lebih baik. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya sampah yang tidak ditanggulangi di areal penduduk akan mengalami gangguan yaitu terjadinya pencemaran udara seperti bau busuk, menyumbat parit sehingga timbul banjir, pencemaran air tanah, mengganggu keindahan lingkungan, menjadi sarang lalat, tikus, kecoa, dan jasad renik yang dapat menjadi perantara atau sumber penyakit yang akan mengakibatkan gangguan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA), typus, diare, disentri, penyakit perut, cacingan, penyakit kulit dan demam berdarah, malaria, kaki gajah yang disebabkan oleh nyamuk. Dalam hal ini dampak bahaya dari gangguan sampah yang bisa berakibat terhadap terserangnya penyakit maka dapat mengancam kesejahteraan hidup manusia. Kondisi kehidupan yang nyaman, terganggu kesejahteraan manusianya baik sehat jasmani ataupun rohani, dikarenakan terjadinya serangan penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan sampah.

Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dari hasil pengamatan sementara masalah-masalah yang ditemukan di tempat penelitian adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah, dalam hal membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktu yang telah ditentukan yaitu dari jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 wita, serta masih kurangnya pengawasan pemerintah yang terkait dan masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah seperti masih kurangnya Tempat Penampungan Sementara(TPS) sampah yang ada di Kelurahan Bukit Pinang.

Perumusan Masalah

Sampah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007:187).

Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007:534), adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu.

Pengelolaan Sampah

Notoatmodjo (2007:191), mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Dalam Peraturan Walikota Nomor 016 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, menggunakan dan mendaur ulang sampah sedangkan Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan tahapan dalam memberikan batasan dalam suatu istilah atau konsep yang diperlukan dalam penelitian ini. Pembatasan pengertian tersebut akan mempermudah penulis dalam pemahaman dan juga untuk membatasi ruang lingkup penulis.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah untuk diterapkan atau dilaksanakan di masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijakan adalah keseluruhan rangkaian proses yang melibatkan seluruh unsur terkait dalam pelaksanaan suatu keputusan kebijakan sesuai dengan amanat, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalamnya.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

dan staf Kelurahan Bukit pinang, dan yang menjadi *informan* lainnya adalah masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2012:130) Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan *Library Research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada.
 - b. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).
 - c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, yang relavan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013:91-100), menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda

Pada awalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebelum tahun 1978 masih bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Tingkat II Samarinda sebagai Seksi Kebersihan. Pada tahun 1979 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Tingkat II Samarinda dibentuk berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 1979 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya tingkat II Samarinda. Selanjutnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menjadi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Tingkat II Samarinda. Perda Nomor 03 Tahun 2001 tanggal 23 pebruari 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Samarinda merubah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) menjadi Kantor Kebersihan Pertamanan dan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda melakukan penyelenggaraan penanganan sampah dari berbagai permasalahan yang di timbulkan dari sampah tersebut, maka Dinas DKP melaksanakan penanganan sampah dengan menggunakan prinsip *reuse*. Namun prinsip *reuse* ini tidak terlepas dari prinsip yang lainnya karena saling berhubungan.

Pengelompokan Sampah Basah dan Kering

penanganan sampah basah dan sampah kering di Kelurahan Bukit Pinang Samarinda dengan menerapkan prinsip 3 R yaitu : *reduse* (mengurangi), *re-use* (memakai), dan *recycle* (daur ulang).

Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Sumber Dan atau Dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketempat Pemrosesan Akhir.

Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Sumber Dan atau Dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketempat Pemrosesan Akhir di kelurahan Bukit Pinang Samarinda dilaksanakan/dilakukan oleh petugas organisasi formal atau dilakukan oleh petugas dari lingkungan masyarakat setempat baik dari pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.

pengolahan dalam mengubah bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah di Kelurahan Bukit Pinang masih belum terlaksana dengan apa yang diharapkan hal tersebut diakibatkan terbatasnya lahan untuk pengolahan sampah tersebut.

Faktor-Faktor Penghambat Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012

kesadaran masyarakat perlu di tingkatkan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda nomor 016 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Masyarakat perlu mengetahui waktu pembuangan sampah yang sudah di atur oleh pemerintah

PEMBAHASAN

Pengurangan Sampah

Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 016 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang memuat tentang pembatasan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda melakukan penyelenggaraan pengurangan sampah dengan memberikan dorongan kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan barang atau bungkusan yang dapat dipakai beberapa kali untuk didunakan kembali dengan fungsi lainnya.

Pembatasan Timbunan Sampah

Penanganan Sampah

Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan walikota Samarinda Nomor 016 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka pula kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan jumlah sampah. Oleh karena itu diperluakan penanganan secara tepat agar sampah tersebut tidak menimbulkan masalah baik bagi manusia mau pun lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa penanganan sampah yang di selenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah di Kota Samarinda dengan baik akan tetapi pemilihan sampah yang dilakukan oleh masyarakat saat membuang sampah ke tempat penampungan sementara sampah masih belum dilakukan, dalam hal pengangkutan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik namun masih ada masyrakat yang membuang sampah di luar dari waktu yang telah dittentukan tersebut.

Pengelompokan Sampah basah dan Sampah Kering

Sampah basah/sampah organik yaitu terdiri dari bahan- bahan yang dapat terurai seacara alamiah, seperti sisa makanan, potongan sayur-sayuran dan lain-lainnya. Seperti yang di kemukakan oleh (Basriyanta,2007,18): sampah berdasarkan asalnya ada padat dapat digolongkan dua yaitu sebagai berikut: sampah organik dan sampah anorganik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengelompokan sampah basah dan sampah kering yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yakni penanganan sampah basah dan sampah kering dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip diantaranya dengan 4 R. *Reflace*(mengganti),yakni mengganti barang barang-barang yang ramah lingkungan, *Reduce*(mengurangi), *Reuse*(memakai) yakni memakai atau menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai, dan *Raycycle*(mendaur ulang). Namun Dalam pegelompokan sampah basah dan sampah kering perlu adanya pembuatan tempat-tempat atau bak-bak sampah yang menyediakan pemisahan sampah basah dan sampah kering dalam satu tempat bak/tempat sampah.

Pengangkutan Dalam Bentuk Membawa Sampah Dari Sumber dan atau Dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Menuju Ketempat Pemrosesan Akhir.

Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir merupakan pemindahan hasil pengumpulan sampah kedalam peralatan pengangkut sampah (truk). Mekanisme, sistem atau cara pengangkutannya untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, yang didukung oleh partisipan masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan.

dan Pertamanan Kota Samarinda, karena masyarakat hanya membuang sembarangan dan tidak dimasukkan kedalam tempat pembuangan sementara sampah. Dan membuang sampah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pengelolaan sampah yang meliputi Pengurangan Sampah dan penanganan sampah. Dalam pelaksanaan pengurangan sampah yang meliputi antara lain pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dan Kelurahan Bukit Pinang, akan tetapi pelaksanaan tersebut masih kurnagnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, serta terbatasnya pemasaran, dana dan tenaga kerja.

Dalam pelaksanaan penanganan sampah yang meliputi antara lain pengelompokan sampah basah dan sampah kering, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir sudah terlaksana dengan baik namun pelaksanaan tersebut harus perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, serta masih terbatasnya ketersediaan tempat-tempat penampungan sementara yang menyediakan pemisahan sampah basah dan sampah kering, serta masih terbatasnya armada pengangkut sampah yang layak beroperasi dalam pengangkutan sampah.

b. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012

Faktor pendukung Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 antara lain kebijakan Peraturan Walikota Samarinda, beserta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sedangkan faktor penghambat peraturan Walikota Samarinda antara lain masih minimnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah, dana serta kesadaran masyarakat.

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012. Partisipasi Masyarakat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah tertaksana, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran pada peraturan Walikota Samarinda yakni membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan.

sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah sudah ada, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, akan tetapi ketersediaan sarana dan prasarana yang diberikan masih kurang jumlahnya dan banyak yang tidak layak dalam beroperasi dalam proses pengangkutan sampah

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012. Masih minimnya sarana dan prasarana yang dalam kondisi memadai untuk pengelolaan sampah, beserta masih terbatasnya Dana yang

- Satori, Djam'an & Aan Komariyah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soenarko, Sd. 2005. *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitaian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- 2013 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik* . Malang : BayuMedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 016 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Sumber internet :

([http://repository.usu.ac.id/bitstream/.../30773/...\(chapter%2011.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/.../30773/...(chapter%2011.pdf) diakses 27 November 2012 jam 10.09 WITA).

<http://repository.usu.ac.id.handle/123456789/6582>diakses 7 Desember 2012 jam 20.45 WITA).